PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Survei pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)

Aida Siti Hamidah

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The phenomenon happened that is the implementers is responsible not yet doing recording accurately, less accurate of doing a plan, there are some results of the activities that have not yet reached the optimal target as realization happen below the target and the rest more than budgeted. On the other hand there are components that are not budgeted activities. If there are activities that are not budgeted, then it should be revised budget or activity.

The purpose of this study to know how much effect of the internal control and the implementation of regional financial accounting system to government agencies in the Plantation Office of West Java Province.

The method used in this research, descriptive and verification method. Descriptive method is used to describe the internal control variable, the variable regional of financial accounting system implementation, and performance variables. To determine the effect internal control and implementation offinancial accounting system regional, used statistical tests. The test statistic used is designing strukural models, designing measurement models, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.

The results of this study show that the internal control positive significant effect to of government agencies and regional financial accounting system implementation has a significant positive effect to of government agencies in the Plantation Office of West Java Province.

Keywords: Internal Control, Financial System Regional Government Performance

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan (Wawan dan Lia, 2009). Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Yayah Handani, 2011).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. (Abdul Rohman, 2007). Diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Yayah Handani, 2011).

Faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan meminimalkan permasalahan-permasalahan operasional adalah menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen,

atau yang juga sering disebut sebagai sistem pengendalian intern, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Rahmadi Murwanto,2012:180).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran mengenai pengaruh pengendalian intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah melalui pengumpulan data dengan melakukan pengujian empiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
2. mengetahui besar pengaruh pelaksanaan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja maupun masalah-masalah pada pengendalian intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dan pengaruh pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Intern

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Menurut Mulyadi (2002:181) menyatakan bahwa pengertian pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (c) efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Rahmadi Murwanto (2012:209) menyatakan bahwa proses pengendalian meliputi fase-fase yang saling berkaitan yaitu:

a. Perencanaan (*programming*)
   Suatu perencanaan akan memuat beberapa varian yang dapat digunakan sebagai kontrol atas manajemen organisasi.

b. Penganggaran (*budget formulation*)
   Penganggaran digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja dari segi keuangan, dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya.
c. Operasionalisasi
   Pengukuran kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan suatu kegiatan operasional, sekaligus sebagai sarana pengendalian.
d. Evaluasi (*evaluation*)
   Evaluasi kinerja dapat menghasilkan perubahan atas rencana, perubahan anggaran, atau modifikasi pada operasionalisasi.

2.1.2 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007:40) sistem akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).Menurut Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI (2001) sistem akuntansi keuangan daerah secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini adalah menurut Abdul Halim (2007:40):

1. Pengidentifikasian
   mengidentifikasi transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan menangkap peristiwa yang memenuhi syarat sebagai transaksi.
2. Pengukuran
   Pengukuran yang tidak tepat ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang salah atau tidak tepat.
3. Pencatatan
   Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*.
4. Penggolongan
   Tahap dimana sebuah jurnal umum dari transaksi yang ada dalam satu periode digolongkan berdasarkan jenis-jenisnya menjadi urut supaya mudah dalam penyajian datanya.
5. Pelaporan
   Setelah semua proses selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002:28) kinerja adalah sejauh mana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan daerah tersebut. Menurut Wibowo (2007:7) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Dan kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sejauh mana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian adalah menurut Mardisamo (2009;128) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
3. Untuk menunjukan standar kinerja.
4. Untuk menunjukan efektifitas.
5. Untuk membentu menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) bahwa pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

Menurut Mardiasmo (2002:143) untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan *value for money* (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional pemerintah dilingkungan pemerintah daerah. Boynton (2006) menyatakan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengendalian intern (*intern control*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja

Menurut (Mardiasmo, 2009:84) Sistem akuntansi keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Dalam jurnalnya Wawan (2009) menyatakan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:32), objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pengendalian intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2). Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan

antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2011:47), pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:30), desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, dari perencanaan sampai dan pelaksanaan penelitian.

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional.* Menurut Uma Sekaran (2006:177), studi *one shoot* atau *cross sectional* adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.4 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas atau Independent
   Menurut Sugiyono (2010:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Variabel independen pada penelitian ini adalah Pengendalian Intern (X_1) dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2).
2. Variabel terikat atau dependent
   Menurut Sugiyono (2010:40), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
   Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library reserach).* Pengumpulan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*):
   a. Wawancara (Interview)
      Menurut Umi Narimawati (2010:40) , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
   b. Kuesioner
      Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung

secara statistic. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:80) menjelaskan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 136 orang.

Menurut Umi Narimawati (2010:38), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin*, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N}\ e^2}$$

Sumber: Umi narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%,10%)

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 orang.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1. Analisis Data Deskriptif
   Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.
2. Analisis Data Verifikatif
   Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0.* Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah

variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya. Menurut Imam Ghozali (2006:18), *Partial Least Square* (PLS) merupakan merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari yang dilakukan dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi. Hasil penelitian diuraikan berdasarkan jawaban kuesioner dari responden yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu pengaruh pengendalian intern dan pelaksanaan terhadap kinerja instansi pemerintah.

4.1.1 Pengujian Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas

   Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan kata lain untuk melihat apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan dari variabel yang diteliti. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari kritis 0,30, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

   Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel).

   Berdasarkan Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tepat, dapat dipercaya (reliable) dan konsisten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 40 responden secara berulang-ulang dalam waktu berbeda *(range)* 2 minggu.

4.1.2 Analisis Deskriptif Pengendalian Intern

Pengendalian Intern diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang pengendalian intern di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Intern (X_1)

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Perencanaan	134	200	67.0%	Cukup Baik
2	Penganggaran	133	200	66.5%	Cukup Baik
3	Operasionalisasi	142	200	71.0%	Cukup Baik
4	Evaluasi	163	200	81.5%	Baik
Total		**572**	**800**	**71.5%**	**Cukup Baik**

Skor penilaian yang diberikan responden untuk variabel Pengendalian Intern diperoleh sebesar 572 yang setara dengan 71,5% berada diantara interval 61%-80%. Artinya penilaian untuk variabel Pengendalian Intern pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Jika dilihat berdasarkan indikator, tampak persentase skor tanggapan indikator perencanaan, penganggaran dan operasionalisasi sudah dirasakan cukup oleh pegwai dan indikator evaluasi sudah dirasakan baik oleh pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X_2)

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Pengidentifikasian	165	200	82.5%	Baik
2	Pengukuran	173	200	86.5%	Baik
3	Pencatatan	163	200	81.5%	Baik
4	Penggolongan	157	200	78.5%	Cukup Baik
5	Pelaporan	154	200	77.0%	Cukup Baik
Total		**812**	**1000**	**81.2%**	**Baik**

Skor penilaian yang diberikan responden untuk variabel Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh sebesar 812 yang setara dengan 81,2% berada diantara interval 81%-100%. Penilaian untuk variabel Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masuk dalam kategori baik. Artinya penilaian untuk variabel Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat berdasarkan indikator dimana indikator pengidentifikasian, pengukuran dan pencatatan sudah dalam kategori baik dan indikator penggolongan dan pelaporan termasuk dalam kategori cukup baik.

4.1.4 Hasil Deskriptif Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Kinerja Instansi Pemerintan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Instansi Pemeritah (Y)

No	Indikator	Total Skor	Skor Ideal	%	Kriteria
1	Memperjelas tujuan organisasi	137	200	68.5%	Cukup Baik
2	Evaluasi target akhir	144	200	72.0%	Cukup Baik
3	Menunjukkan standar kinerja	163	200	81.5%	Baik
4	Menunjukkan efektivitas	143	200	71.5%	Cukup Baik
5	Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling mencapai sasaran	152	200	76.0%	Cukup Baik
Total		**739**	**1000**	**73.9%**	**Cukup Baik**

Skor penilaian yang diberikan respondne untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh sebesar 739 yang setara dengan 73,9% berada diantara interval 61%-80%. Artinya untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah masuk dalam kategori cukup baik. Jika dilihat berdasarkan indikator memperjelas tujuan organisasi, evaluasi target akhir, menunjukkan efektivitas dan menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling mencapai sasaran sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh para wajib pajak dan indikator menunjukkan standar kinerja sudah dalam kategori baik.

4.1.5 Hasil Analisis Verifikatif

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS 2.0*, maka hasil analisis verifikatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,542 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang sedang (cukup) dan memiliki pengaruh yang positf. Dimana jika Pengendalian Intern meningkat akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebaliknya, jika Pengendalian Intern yang kurang baik akan diikuti Kinerja Instansi Pemerintah yang kurang baik pula.
2. Nilai koefisien korelasi Pelaksnaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,354 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang rendah (lemah) dan memiliki pengaruh yang positif. Dimana jika Pelaksnaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebaliknya, jika Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang kurang baik akan diikuti Kinerja Instansi Pemerintah yang kurang baik pula.

Nilai koefisien determinasi menunjukan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Hasil uji dari nilai koefisien determnasi adalah Pengendalian Intern memberikan pengaruh sebesar 37,4% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 20,6% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Secara total keduanya Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 58,0% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan sisanya adalah *gap* sebesar 42% yang merupakan pengaruh dari faktor–faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk Pengendalian Intern sebesar 5,185. Nilai statistik uji t yang diperoleh berada didaerah tolak H0 yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} = 1,96. (t_{hitung} = 5,185 > 1,96) maka dapat diambil keputusan untuk menolak H0.

Jadi dapat disimpulkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Besarnya pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah (0,542×0,542×100%) = 29,4%. Jadi Pengendalian Intern memberikan pengaruh secara langsung jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan sebesar 29,4% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah . Sedangkan pengaruh secara tidak langsung Pengendalian Intern karena adanya hubungan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar (0,542×0,419×0,354×100%) = 8,0%.

Secara keseluruhan besarnya pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh sebesar 37,4%, artinya bahwa kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan atau disebabkan oleh pengendalian intern.

2. Pengujian Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 3,167. Nilai statistik uji t yang diperoleh berada didaerah tolak H0 yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} = 1,96. (t_{hitung} = 3,167 > 1,96) maka dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Jadi dapat disimpulkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah (0,354×0,354×100%) = 12,5%. Jadi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan pengaruh secara langsung jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan sebesar 29,4% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan pengaruh secara tidak langsung Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah karena adanya hubungan dengan Pengendalian Intern, terhadap Kinerja sebesar (0,354×0,419×0,542×100%) = 8,0%.

Secara keseluruhan besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja diperoleh sebesar 20,5%, artinya bahwa kinerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan atau disebabkan oleh pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Secara total keduanya Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 58,0% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan sisanya adalah *gap* sebesar 42% yang merupakan pengaruh dari faktor–faktor lain yang tidak diteliti.

Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja dibandingkan pengendalian intern terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja lebih dominan dipengaruhi oleh pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh Pengendalian intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan diperoleh nilai t_{hitung} untuk Pengendalian Intern adalah sebesar 5,185. Nilai statistik uji t yang diperoleh berada didaerah tolak H0 yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} yaitu 1,96. Jadi dapat disimpulkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengendalian intern berpengaruh sebesar 29,4% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai korelasi sebesar 0,542 yang berarti

pengendalian intern memberikan pengaruh positif rendah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Profinsi Jawa Barat. Arah hubungan positif pengendalian intern dengan kinerja Instansi Pemerintah menunjukan bahwa pengendalian yang optimal akan diikuti dengan kinerja Instansi Pemerintah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengendalian intern memberikan pengaruh sebesar 29,4% (cukup) terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya 29,4% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa pengendalian intern mempunyai skor tanggapan responden sebesar 71,5% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang artinya pengendalian intern cukup mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator evaluasi dengan persentase skor aktual sebesar 81,5%, selanjutnya indikator operasionalisasi dengan persentase skor aktual sebesar 71,0%, selanjutnya indikator perencanaan dengan presentase skor aktual sebesar 67,0% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator perencanaan dengan persentase skor aktual sebesar 66,5%. Terdapat *gap* dari analisis deskriptif sebesar 28,5% dan itulah yang merupakan masalah yang ada pada pengendalian intern.

Selanjutnya kinerja Instansi Pemerintah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 73,9% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah menunjukkan standar kinerja dengan persentase skor aktual sebesar 81,5%, selanjutnya indikator menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling efisien untuk mencapai sasaran dengan persentase skor aktual sebesar 76,0%, kemudian indikator evaluasi target akhir dengan persentase skor aktual sebesar 72,0%, kemudian indikator menunjukkan efektifitas dengan persentase skor aktual sebesar 71,5%, dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator memperjelas tujuan organisasi sebesar 68,5%.

Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari variasi data masing-masing variabel, kemungkinan pengendalian intern cukup mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa pengendalian intern mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah sebesar 29,4%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada pengendalian intern dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperhatikan faktor perencanaan (0,863) dengan lebih cermat dalam melakukan perencanaan, kemudian faktor penganggaran (0,770) dengan cara lebih dijelaskan tentang prosedur penganggaran, kemudian faktor operasionalisasi (0,731) dengan cara lebih disesuaikan peran pengawasan intern dalam pencegahan penyimpangan dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor evaluasi (0,734) dengan cara lebih memperhatikan proses perencanaan, penganggaran, dan operasionalisasi agar informasi yang disediakan dalam mengevaluasi itu relevan dan dapat dipercaya.

Hal yang sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu indikator pengendalian intern yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah perencanaan dengan persentase total skor aktual sebesar 67,0% dengan gap sebesar 33,0% yang berarti sebesar 33,0% respoden memang berpendapat merasa masih ada kekurangan di dalam proses perencanaan. Hal ini juga dibuktikan melalui kuisioner, dimana sebesar 15 orang responden menjawab sistem pengendalian dalam melakukan suatu perencanaan selama ini sudah cukup cermat.

Fenomena yang terkait adalah pelaksana yang bertanggung jawab tidak melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati prosedur yang ada, belum ada kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan suatu perencanaan, ketetapan pelaksanaan kebijakan yang kurang tepat, belum melakukan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian (Hadi Poernomo, 2012).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dimana pengendalian intern yang optimal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja (Rahmadi Murwanto, 2012:195) dan didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan Pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka (Rina Tresnawati, 2012).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengendalian intern, maka masalah pada kinerja dapat diselesaikan. Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan lingkungan pengendalian dengan memperhatikan komitmen terhadap kompetensi dan memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan. Dalam meningkatkan penilaian resiko, Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan informasi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan (Tuti Herawati, 2014)

4.2.2 Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah dengan diperoleh nilai t_{hitung} untuk pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 3,167. Nilai statistik uji t yang diperoleh berada didaerah tolak H0 yaitu t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} yaitu 1,96. Jadi dapat disimpulkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar 12,5% terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai korelasi sebesar 0,354 yang berarti pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif rendah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perkebunan Profinsi Jawa Barat. Arah hubungan positif pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi pemerintah menunjukan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal akan diikuti dengan kinerja Instansi Pemerintah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 12,5% (rendah) terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya 12,5% tersebut dapat dijelaskan dari analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil deskriptif membuktikan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 81,2% dan termasuk dalam kategori baik yang artinya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sudah baik mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator pengukuran dengan persentase skor aktual sebesar 86,5%, selanjutnya indikator pengidentifikasian dengan persentase skor aktual sebesar 82,5%, selanjutnya indikator pencatatan dengan presentase skor aktual sebesar 81,5%, selanjutnya indikator penggolongan dengan presentase 78,5% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pelaporan dengan persentase skor aktual sebesar 77,0%. Terdapat *gap* dari analisis deskriptif sebesar 28,8% dan itulah yang merupakan masalah yang ada pada pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Selanjutnya kinerja Instansi Pemerintah mempunyai skor tanggapan responden sebesar 73,9% dan masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya kinerja Instansi Pemerintah pada

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah menunjukkan standar kinerja dengan persentase skor aktual sebesar 81,5%, selanjutnya indikator menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling efisien untuk mencapai sasaran dengan persentase skor aktual sebesar 76,0%, kemudian indikator evaluasi target akhir dengan persentase skor aktual sebesar 72,0%, kemudian indikator menunjukkan efektifitas dengan persentase skor aktual sebesar 71,5%, dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator memperjelas tujuan organisasi sebesar 68,5%.

Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari variasi data masing-masing variabel, kemungkinan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah cukup mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa pengendalian intern mempengaruhi kinerja Instansi Pemerintah sebesar 12,5%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperhatikan faktor pengidentifikasian (0,788) dengan lebih teliti dalam melakukan pengidentifikasian transaksi-transaksi yang dilakukan, kemudian faktor pengukuran (0,857) dengan cara lebih cermat dalam pengukuran agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang tepat, kemudian faktor pencatatan (0,770) dengan cara pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, kemudian faktor penggolongan (0,733) dengan cara lebih teliti dalam penggolongan akun dan yang terakhir adalah memperbaiki faktor pelaporan (0,773) dengan cara lebih memahami standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Hal yang sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yaitu indikator pengendalian intern pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang berasal dari tanggapan responden paling rendah adalah pelaporan dengan persentase total skor aktual sebesar 77,0% dengan gap sebesar 23,0% yang berarti sebesar 23,0% respoden memang berpendapat merasa masih ada kekurangan di dalam proses pelaporan. Hal ini juga dibuktikan melalui kuisioner, dimana sebesar 14 orang responden menjawab standar akuntansi pada sistem akuntansi dalam pelaporan selama ini cukup sesuai dengan standar akutansi yang ditetapkan.

Fenomena yang terkait adalah Sistem akuntansi keuangan dalam pelaporan belum mengikuti standar akuntansi yang ditentukkan dan pada pencatatan berbasis kas, hanya mencatat uang yang masuk dan yang keluar dari rekening pemerintah daerah. Akibatnya, tidak semua transaksi keuangan dapat tercatat dalam neraca pemerintah (Hadi Poernomo, 2012).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dimana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang optimal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut (Mardiasmo, 2009:84) dan didukung oleh penelitian terdahulu pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai (Wawan Sukmawan, 2009).

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran, hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengendalian intern, maka masalah pada kinerja dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, selain mempersiapkan sistem yang baik hendaknya sumber daya manusianya harus terlebih dahulu dipersiapkan. Apabila menggunakan sumber daya manusia yang telah ada maka terlebih dahulu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang cukup, mengenai sistem secara terprogram dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah (Wawan Sukmawan, 2009).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan berkaitan dengan pengaruh Pengendalian intern dan Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap Kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pengaruh pengendalian intern terhadap Kinerja pegawai pemerintahan daerah diperoleh relatif besar. Secara keseluruhan pengendalian intern sudah cukup baik meskipun masih belum mencapai tingkat ideal. Evaluasi dalam pengendalian intern terlihat sudah baik sedangkan indikator pengendalian intern yang dinilai dimana prosedur kebijakan penganggaran yang dijalankan masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik.
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh terhadap Kinerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kinerja pegawai pemerintahan daerah diperoleh relatif kecil. Pelaksanaan Sistem akuntansi keuangan daerah secara umum sudah baik meskipun belum mencapai sempurna. Indikator pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dinilai relatif paling rendah dan masih belum baik saat ini adalah pelaporan dan penggolongan. Penggolongan akun yang telah dicatat dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum sepenuhnya sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan dan pelaporan dalam pelaksanaan sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan pengendalian intern diperlukan proses perencanaan yang lebih cermat dengan cara SDM-nya lebih teliti dalam melakukan perencanaan agar rencana terealisasi dengan maksimal, dan prosedur penganggaran lebih diperjelas agar karyawan dapat dmemahami prosedur penganggaran yang digunakan.
b. Untuk meningkatkan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu mempersiapkan sistem yang baik dan sumber daya manusia yang paham untuk mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah, dengan diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Selain itu perlu ditingkatkan pengetahuan SDM yang ada tentang pedoman-pedoman akuntansi yang benar, agar lebih teliti lagi didalam melakukan proses penggolongan, dan lebih dipahami standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam pelaporan agar dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI 2001.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mulyadi, 2002, Auditing, Edisi Keenam, Cetakan Pertama , Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta.

Rahmadi Murwanto. 2012. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LPKPAP.

Rina Tresnawati. 2012. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Forum Bisnis dan Keuangan I, ISBN:978-602-17225-0-3.

Sugiyono, 2011, Statistika Untuk Penelitian Cetakan Kesembilan Belas.Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alphabeta.

Tuti Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur) STAR – Study & Accounting Research Vol XI, No. 1 – 2014. ISSN: 1693-4482

Uma Sekaran, 2006, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Uma Sekaran, 2006, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. (2010). Penulisan Karya Ilmiah. Genesis : Bekasi.

Umi Narimawati, 2007, Teknik-Teknik Analisis Multivariat. Yogyakarta : Grahailmu.

Umi Narimawati., Sri Dewi Anggadini., Lina Ismawati, 2011. Penulisan Karya Ilmiah. Unikom. Genesis, Bandung.

Wawan Sukmana Dan Lia Anggarsari. 2009.Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Fe Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009.

Yayah Handani. 2011. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah – Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol, 9 No 1 Febuari 2009 21.

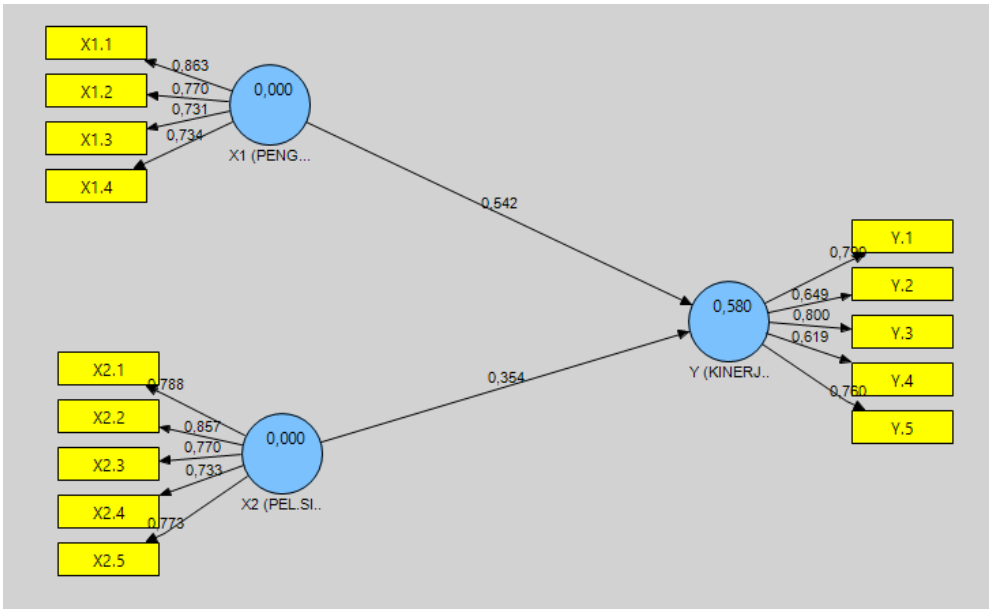
Hadi Poernomo, 2012. Sinergi BPK dan APIP dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta : www,bpk.go.id

Herry Poernomo, 2010. Laporan Keuangan Daerah Memprihatinkan. Jakarta : www.kompas.com

Gatot Tjahyono, 2014. DPRD Jabar Nilai Kinerja Perencanaan Pemprov Buruk Akibat APBD Provinsi Tak Terserap. Jawa Barat : www.lintasjabar.com

LAMPIRAN

Koefisien Jalur Struktural



PLS BOOTSRAPING

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
X1 -> Y	0.542	0.518	0.105	0.105	5.185
X2 -> Y	0.354	0.398	0.112	0.112	3.167

Nilai t hitung

